Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah berkembang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Muara dari hal tersebut adalah tingkat pelayanan pemerintah daerah yang maksimal kepada masyarakatnya (Arif, 2008).

Organisasi sektor publik saat ini tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan publik. Akuntansi sektor publik awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu (Anik Yuesti,dkk, 2020).

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembagalembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, ataupun proyek– proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Manajemen keuangan publik merupakan kata lain akuntansi sektor publik. Ruang lingkup dan elemen manajemen keuangan publik, seperti perencanaan makroekonomi, mobilisasi pendapatan, penganggaran, realisasi anggaran, dan audit, telah dijabarkan menurut perspektif akuntansi. Maka itu,

akuntansi sektor publik dapat disimpulkan sebagai salah satu aliran dari manajemen keuangan publik. (Pof Indra Bastian)

Organisasi publik dapat berfokus pada peningkatan pelayanan berjangka panjang. Dengan kata lain, dampak pelayanan menuju kualitas kehidupan generasi berikut amat diperhatikan, seperti penyediaan infrastruktur dan alokasi dana publik. Fenomena besar yang terakhir dalam konteks akuntansi sektor publik adalah reformasi tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negaranegara lain. Tuntutan reformasi ini menyebabkan demokratisasi pengelolaan organisasi melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Secara khusus, tuntutan ini lebih dikaitkan dengan bidang pengelolaan keuangan publik. (Prof Indra Bastian)

Terdapat 3 mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih *responsif*, transparan dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu : (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2006).

Standar yang berlaku dalam lingkup pemerintahan adalah standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Permadi (2013), SAP adalah suatu standar penyusunan laporan keuangan untuk lingkup pemerintahan yang di susun sesuai dengan prinsip- prinsip akuntansi sebagai pedoman dalam hal penyusunan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penyajian laporan keuanganpemerintah. Bisa dikatakan bahwa SAP adalah tolak ukur dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam pelaporan akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh *IFAC Public Sector Committee* dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2014 menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Dengan adanya pelaporan berbasis akrual pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Tujuan pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah adalah ingin mewujudkan terciptanya laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mencapai keinginan tersebut, makan dibutuhkan adanya pembaharuan serta perubahan yang dimana nantinya SAP mampu memberikan pedoman pokok agar pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat menyusun dan menyajikan secara lebih baik lagi laporan keuangannya (Setiawan & Gayatri, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Terdapat perbedaan antara standar basis kas dengan standar basis akrual. Standar akuntnasi berbasis kas sendiri hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas. Sedangkan standar akuntansi berbasis akrual, selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah utang dan piutang. Sistem berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akuratatas kondisi keuangan pemerintah daerah atau kota daripada sistem berbasis kas. Selain itu,basis akrual mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian, berbeda dengan basis kas dimana pembayaran hanya dicatat jika terjadinya transaksi.

Rahmawati(2016), bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi kekurangan basis kasdalam memberikan data yang lebih akurat. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebihtransparan mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan meningkatkankualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas,tidak hanya sekedar basis kas.

Meskipun adanya perubahan penerapan SAP dari SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadiSAP Berbasis Akrual, namun hal ini justru menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah agar dapatmeningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Untuk mendukungkeberhasilan implementasi standar akuntansi berbasis akrual, maka diperlukan adanya sumber dayamanusia yang kompeten, komitmen atau dukungan dari pimpinan, sistem akuntansi, dan uji coba(Riandani, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance government)* meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Pihak – pihak pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain : masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah sendiri (Warsito dkk, 2008).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance government)*, yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Dita, 2011).

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Manfaat prediktif *(predictive value)*. Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dapat dicegah.

e. Andal , yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

f. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

g. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dari karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah tersebut, ketepatwaktuan dan keterandalan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Ketepatwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi *(accuracy/precision)* atau keterandalan. Jadi terdapat saling korban (*trade-off*) antara ketepatwaktuan dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan. Namun, berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas secara material. Dengan begitu ketepatwaktuan dengan aproksimasi justru akan meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Suwardjono, 2005 dalam Desi dan Ertambang, 2008).

Mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK) telah relevan, andal, dan dapat dibandingkan juga dapat dipahami?

Dari berbagai sumber internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai, juga masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mendapatkan hasil audit Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau selama 4 tahun berturut-turut yakni dari tahun 2016 hingga 2019. Predikat WTP kinerja keuangan ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kota se-provinsi Riau. (m.goriau.com). Beberapa tulisan yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut

1. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan keuangan tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun 2018 pada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini diberikan atas dasar kesesuaan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah(SAP), efektifitas sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pengendalian intern(SPI), kepatuhan terhadap undang-undang serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BOK mengungkapkan adanya permaslahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. https://riau.bpk.go.id

2. Untuk pemeriksaan LPH atas laporan keuangan tahun 2019 indragiri hilir mendapatkan hasil pemeriksaan dari BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa pokok temuan yang perlu untuk diperhatikan antara lain yaitu
    1. Penatausahaan kas belum tertib;
    2. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib;
    3. Denda keterlambatan belum dikenakan pada beberapa pekerjaan; dan
    4. Kekurangan volume pekerjaan fisik. https//riau.bpk.go.id

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Publik, 2006 dalam Desi dan Ertambang, 2008). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Faktor kedua yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi (2007) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap manfaat dirasakan. Pemerintah kota Palembang merasakan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada sektor publik. Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan teknologi informasi, dapat berdampak pada penerimaan teknologi informasi, karena pada umumnya teknologi informasi sudah terbukti dapat memberikan kemudahan dalam membantu kegiatan di sektor publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* tetapi pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal (Wahana Komputer, 2003).

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007).

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundangundangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk 6 dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah sistem pengendalian intern pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP.

Penelitian Hendra Wansyah, Darwanis, dan Usman Bakar (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan Teknologi informasi dan aktivitas operasi secara simultan berpengaruh terhadap informasi nilai SKPD pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian sumber daya manusia.

Penelitian Weni Nuranda dan Heru Fahlevi (2018) Penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, akuntansi Pengendalian intern dan pengawasan keuangan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

daerah menentukan nilai informasi pemerintah daerah pelaporan keuangan SKPK Kabupaten Pidie baik secara individu maupun kolektif.

Penelitian Sally Paulina Sandanafu dan Mis Fertyno Situmeang (2018) Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pengendalian internal akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan lokal sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi keuangan daerah itu ditunjukkan dengan nilai koefisien 0,128 dengan tingkat signifikansi 0,060.

Dengan adanya ketidak konsistenan terhadap hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik menguji kembali bagaimana pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi Informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuaangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian review dari penelitian Hendra Wansyah, Darwanis, dan Usman Bakar (2012), Chandra Satria (2020) dan Sally Paulina Sandanafu, Miss Fertyno Sitmeang (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengampilan populasi dan sampel penelitian yakni seluruh pegawai SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untunk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"

1. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir?
3. Apakah Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaoran keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

1.3.2 Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah

Manfaat Teoritis

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia, merupakan kunci keberhasilan pencapaian kinerja, kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi, *E-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, Pada intinya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.
3. Pengendalian Intern Akuntansi ditujukan untuk mencapa tujuan yang saling berkaitan didalam satu atau lebih kategori yaitu : pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.
4. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan, manfaat dan tujuan penyampaian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.
2. Bagi Penulis,diharapkan dapat lebih memahami kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daearah serta menambah wawasan penulis dalam bidang sektor publik.
3. Bagi Akademisi, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

1.4 Sistematika Penulisan

Pembahasan ini terdiri dari lima nan garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah yang melandasi memilih judul , rumusan masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan pemerintah daerah, pengertian kapasitas sumber daya manusia,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi serta kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data da sumber data, teknik pengambilan data dan teknik analisis data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian, gambaran data yang terkumpul, pengujian data dan analisis data penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini akan dibahas mengenai kesimpulan akhir serta saran-saran yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri